

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan juga menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak (Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998) . Besarnya potensi pasar kredit yang ada di Indonesia terutama kredit konsumtif serta didukung dengan berkembangnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia . Beberapa bank yang menyediakan jasa penyaluran yang sama yaitu dalam hal penyaluran kredit seperti BPD (Bank Pembangunan Daerah) , Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Bank Mandiri, BRI (Bank Rakyat Indonesia), BTN (Bank Tabungan Negara) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Jatim atau Bank Jabar di Indonesia pun ikut serta dalam meramaikan pasar kredit yang ada di Indonesia. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang merupakan salah satu bank yang menyediakan kredit multiguna pada nasabah.

Bank pada dasarnya memiliki peran penting dalam penyaluran kredit yang diberikan, dengan begitu maka kebutuhan masyarakat dapat terbantu dan terpenuhi. Kredit merupakan solusi dalam memperoleh pinjaman dana dengan tagihan yang dibebankan kepada nasabah melalui tagihan langsung atau penodebitan gaji dari rekening yang bersangkutan . Salah satu bentuk kredit yang dibahas ialah Kredit Multiguna. Kredit multiguna adalah kredit yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai atau Calon Pegawai perusahaan daerah maupun negeri yang MOU (*Memorandum Of Understanding*), Anggota polisi, Anggota Legislatif, Karyawan Perusahaan Swasta, Pensiunan dan Purnawirawan.

Kredit sebagai salah satu cara memperoleh modal atau untuk memenuhi kebutuhan konsumsi seseorang . Manfaatnya pun telah dirasakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu hingga saat ini . Entah itu kredit dari lembaga perbankan ataupun dari bank-bank swasta kecil lainnya atau bahkan kredit perorangan .

Kredit ini diciptakan sebagai bukti dari perkembangan dunia dalam konsumsi masyarakat terhadap kebutuhan sehari-hari , yang menuntut perputaran modal yang cepat

dengan jumlah modal yang besar . Kredit multiguna pegawai hadir untuk menjembatani antara keterbatasan keuangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya . Dalam peranannya , tidak hanya kredit multiguna yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bisa saja menggunakan kredit umum ataupun kredit kendaraan bermotor atau bahkan kredit yang serupa dengan itu .

Pemberian kredit bagi bank merupakan kegiatan yang utama , karena pendapatan terbesar dari bank berasal dari sektor kredit baik dalam bentuk bunga , provisi ataupun pendapatan lainnya . Pemberian kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian , mulai dari perencanaan besarnya kredit , penentuan suku bunga , prosedur pemberian kredit sampai kepada pengembalian atas kredit yang bermasalah . Aktivitas pemberian kredit merupakan fungsi strategis yang dimiliki bank dan fungsi ini pula yang seringkali menjadi penyebab pailitnya sebuah bank .

Kredit merupakan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan mereka yang memerlukan dana , termasuk pegawai negeri sipil dan atau pegawai swasta yang mana perusahaannya MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan BPD Jawa Timur Cabang Malang . Dilihat dari pihak kreditur , maka unsur yang paling penting dalam kegiatan kredit sekarang ini adalah untuk mengambil keuntungan dari modalnya dengan mengharapkan pengembalian prestasi , bagi debitur adalah bantuan bantuan dari kreditor . Hanya saja antara prestasi dengan pengembalian prestasi tersebut ada suatu masa yang memisahkannya , sehingga dapat tenggat dengan waktu tertentu .

Pegawai negeri sipil dalam hal ini adalah sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat , yang merupakan salah satu pelaksanaan dari kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan kehidupan bangsa dan negara menuju masyarakat yang adil dan makmur . hal ini telah diatur dalam Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang No.8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian dinyatakan bahwa “Pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya , dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada Bank Daerah yang mempunyai corak keberadaan yang berada di setiap kota/kabupaten di seluruh Indonesia sangat tepat dengan adanya keberadaan dari PNS yang

mempunyai kewenangan penuh untuk menerima Surat Keterangan dari PNS tersebut . Pemberian kredit dapat dilaksanakan ketika adanya persetujuan atau perjanjian kredit antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur . Mengingat pentingnya kedudukan dana perkreditan tersebut dalam proses pembayaran , sudah semestinya jika pemberi kredit dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan yang dapat pula memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan .

Jenis asuransi yang diberlakukan oleh bank pada saat ini ada 2 yakni ; (1) Asuransi Jiwa Debitur (2) Asuransi Barang Jaminan Kredit . Salah satu pertimbangan yang paling mendasar adalah yang menyangkut kepentingan atas pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debiturnya . Untuk mengurangi resiko , jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan oleh bank . Apabila unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan . Dalam hal menjaminkan SK Pengangkatan PNS sebagai agunan untuk memperoleh kredit sebelumnya dilakukan perjanjian kredit yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban dari bank sebagai kreditur dan pihak pensiunan pegawai negeri sipil sebagai debitur .

Berdasarkan uraian diatas , penulis memfokuskan pembahasan Tugas Akhir ini yang berjudul Mekanisme Pengajuan Kredit Multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme untuk pengajuan kredit multiguna PNS pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang ?
2. Bagaimana perkembangan kredit multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang ?
3. Bagaimana strategi peningkatan kredit multiguna pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Kantor Cabang Malang ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan mekanisme pengajuan kredit multiguna PNS pada BPD Jawa Timur Kantor Cabang Malang .
- b. Untuk mendeskripsikan perkembangan kredit pada BPD Jawa Timur Kantor Cabang Malang .
- c. Untuk mendeskripsikan strategi peningkatan kredit pada BPD Jawa Timur Kantor Cabang Malang .

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan ilmu dan pemikiran tambahan dalam memperkaya wawasan mekanisme pengajuan kredit multiguna pegawai pada Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Malang .

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan pemikiran bagi pemecahan masalah terkait mekanisme kredit dari penelitian pada Bank Pembangunan Daerah Jatim Cabang Malang . Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan juga referensi bagi penelitian adik tingkat yang hendak menghadapi tugas akhir .